



Judul : Pendidikan Non Formal Belum Dapat Perhatian: Kesenjangan Masih Tinggi
Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Kesenjangan Masih Tinggi Pendidikan Non Formal Belum Dapat Perhatian

KOMISI X DPR menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan sektor formal dengan non-formal. Pendidikan non-formal belum dianggap sebagai salah satu sektor pendukung dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan.

"Pendidikan formal ini kan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pendidikan para siswa. Sisa kebutuhan itu justru bisa didapatkan pada pendidikan non formal. Cuma, ini belum mendapat cukup perhatian," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), kemarin.

Dia mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperkuat sektor pendidikan non formal yang terus mengalami pemangkasan anggaran. Beda dengan anggaran pendidikan formal yang teralokasikan dengan baik dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Siapa pun, sampai usia berapa pun, harus diberi kesempatan menuntut ilmu. Sementara sekarang, kebutuhan itu tidak semuanya bisa dipenuhi oleh pendidikan formal," ujar anggota Fraksi Golkar ini.

Dia menilai, sudah sepatutnya sektor pendidikan non formal mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah. Terlebih, pendidikan non-formal ini cukup beragam. Seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, hingga pendidikan keterampilan.

Hetifah bilang, pendidikan non-formal ditujukan bagi masyarakat yang memerlukan pendidikan dalam bentuk pengganti, penambah, maupun pelengkap pendidikan formal.

Di Kalbar, situasi pendidikan non-formal memprihatinkan. Sementara, pendidikan formal juga punya banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat. Menurutnya, harus ada terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan agar kesenjangan yang terjadi di sektor pendidikan ini bisa diatasi.

Diakuinya, upaya Pemerintah membangun sektor pendidikan ini menghadapi banyak hambatan. Terutama dalam kesenjangan kualitas antar sekolah dan kualitas guru.

"Perlu upaya masif untuk mengejar ketertinggalan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air," kata Lestari.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, peluang untuk merealisasikan pemerataan mutu pendidikan melalui pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar sangat terbuka. Guru-guru berkualitas bisa mengajar di sejumlah sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

"Pemanfaatan teknologi ini membutuhkan kesiapan infrastruktur, keterampilan dan pemahaman yang baik dari para tenaga pengajar, pemangku kepentingan, dan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Lestari mendesak Pemerintah memperbaiki masalah dasar pendidikan seperti sarana dan prasarana, bahan pembelajaran, dan kualitas tenaga pendidik.

"Dibutuhkan upaya terukur agar masyarakat bisa segera menikmati pendidikan berkualitas secara merata di seluruh Indonesia. Ini dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan," pungkasnya. ■ KAL